

## Peranan Pengukuran Kinerja dalam Mewujudkan *Good Governance* di Provinsi Sumatera Utara

Nikita Yasmin De Han \*<sup>1</sup>  
Fitri Lestari <sup>2</sup>  
Heny Triastuti Kurnianingsih <sup>3</sup>  
Ragen <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara  
\*e-mail: [nikita.dehan91@gmail.com](mailto:nikita.dehan91@gmail.com)<sup>1</sup>, [fitrilestari2611@gmail.com](mailto:fitrilestari2611@gmail.com)<sup>2</sup>, [henytrastuti@fe.uisu.ac.id](mailto:henytrastuti@fe.uisu.ac.id)<sup>3</sup>,  
[evikuritongahrp6874@gmail.com](mailto:evikuritongahrp6874@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

*Literature review merupakan proses untuk mempelajari hasil penelitian terdahulu atau yang telah diterbitkan oleh peneliti sebelumnya. Kegiatan literature review ini berguna untuk menambah pengetahuan dalam melakukan penelitian. Riset terdahulu sangat penting dalam suatu bagian ilmiah. Fungsi dari riset terdahulu untuk menguatkan konsep dan fakta yang berhubungan atau saling mempunyai peran antar variable. Artikel ini bertujuan untuk mereview peran pengukuran kinerja dalam mewujudkan good governance di provinsi Sumatera Utara.*

**Kata kunci:** Pengukuran Kinerja, Good Governance, Sumatra Utara

### Abstract

*Literature review is a process to study the results of previous research or that has been published by previous researchers. This literature review activity is useful for increasing knowledge in conducting research. Previous research is very important in a scientific section. The function of previous research is to strengthen concepts and facts that are related or have a role between variables. This article aims to review the role of performance measurement in realizing good governance in the province of North Sumatra.*

**Keywords:** Performance Measurement, Good Governance, North Sumatra

## PENDAHULUAN

*Good governance* mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas. Pengukuran kinerja menjadi alat yang krusial untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam sektor publik. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan. Sejak dimulainya reformasi di Indonesia, beberapa peraturan telah ditetapkan untuk mencapai pemerintahan yang baik. Peraturan tersebut mengatur beberapa hal termasuk tentang pengelolaan keuangan negara dan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan dalam pemerintahan datang dalam bentuk pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan desentralisasi yang meluas. Terwujudnya otonomi dan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Ulum, 2017).

Meningkatkan kinerja karyawan sangat penting bagi organisasi yang menginginkan kinerja tingkat tinggi. Kinerja pegawai yang baik menunjang terwujudnya visi dan misi organisasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul. Strisno (2016: 172) mengartikan kinerja yang dihasilkan dari kerja pegawai ditinjau dari kualitas, kuantitas, jam kerja, dan kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa indikator untuk mengukur kinerja karyawan meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan independensi. Strategi dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola yang baik berperan penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi dan kualitas birokrasi (Octaviana, Idris, Dharma, & Azhar, 2024).

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja membantu pemerintah mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan memaparkan hasil pengukuran kinerja kepada masyarakat luas. Mengukur kinerja sektor publik membantu pemerintah mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam administrasi pemerintahan. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan guna meningkatkan kinerja. Namun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi tantangan tersebut agar penerapan pengukuran kinerja di sektor publik dapat efektif dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (Octaviana et al., 2024).

Di beberapa daerah, termasuk kota Medan, terdapat banyak contoh lingkungan perusahaan BUMN. Salah satunya adalah pinjaman palsu yang dilakukan S. Parman kepada Bank BRI Agro, yang kemudian Kejaksaan Agung telusuri isi dokumen yang ditemukan di kantor Kopkar Pertamina. (Ridwan & Sandi, 2019) berpendapat bahwa pengukuran kinerja berdasarkan standar dan informasi yang diberikan secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu indikator kinerja keuangan dan indikator kinerja non keuangan. Kedua jenis pengukuran kinerja ini masing-masing menggunakan pendekatan berbeda dalam menjelaskan kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Penilaian kinerja digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak pantas dan mendorong serta memperkuat perilaku yang diinginkan dengan memberikan umpan balik yang tepat waktu mengenai hasil kinerja dan memperoleh penghargaan intrinsik dan ekstrinsik.

### *Good Governance*

*Good governance* mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas. Pengukuran kinerja menjadi alat yang krusial untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam sektor publik. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan.

Terdapat 5 pilar GCG yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang biasa kita kenal dengan konsep tarif (transparansi, akuntabilitas, independensi dan berkeadilan), yaitu:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyajikan materi dan informasi yang relevan dengan perusahaan.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab organisasi sehingga pengelolaan usaha terlaksana secara efektif.
3. Tanggung jawab, yaitu keselarasan pengelolaan perusahaan dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
4. Independensi, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak ketiga yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.
5. *Equity*, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak Stakeholder yang bersumber dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Octaviana et al., 2024)

Tata pemerintahan yang baik mengacu pada upaya pemerintah untuk menjamin tata pemerintahan yang baik. Menurut Mardiasmo (2002), tata kelola pemerintahan diartikan sebagai metode pengelolaan urusan publik. Di sisi lain, Bank Dunia mendefinisikan tata kelola yang baik sebagai penerapan manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari kesalahan alokasi sumber daya investasi, dan mencegah korupsi di tingkat politik dan administratif serta pencegahan korupsi. Menciptakan kerangka hukum dan kebijakan bagi penerapan disiplin fiskal dan pertumbuhan kegiatan usaha.

Dalam penerapan *good governance*, masyarakat mempunyai peran penting dalam menilai kualitas kinerja pemerintah, termasuk kualitas pelayanan pemerintah, kualitas penggunaan anggaran, dan kualitas pengadaan barang publik dan infrastruktur seperti jalan. Layanan medis pusat dan layanan lainnya. Di era sekarang, pemerintah semakin dituntut untuk menjadi kekuatan pendorong di balik penyelesaian permasalahan publik, seperti kurangnya layanan pemerintah

bagi masyarakat lokal dan kebijakan yang lebih luas. Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, informasi yang eksklusif untuk kelompok tertentu, atau kesulitan dalam mengakses informasi. Saat ini, fakta bahwa pemerintah tidak menggunakan kewenangan lembaga eksekutif atau rumah tangga untuk menjalankan pemerintahan merupakan masalah besar dan menjadi bahan perdebatan publik (Nainggolan, 2016).

Reformasi di bidang pemerintahan dan keuangan negara dimulai setelah disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Perimbangan Keuangan Daerah menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

Undang-undang Tahun 1956 tentang keuangan negara dan daerah. Munculnya undang-undang ini dipicu oleh adanya desakan masyarakat untuk segera melaksanakan perubahan menyeluruh pada aparatur sipil negara guna mencapai tujuan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memuat otonomi daerah. Dengan kata lain, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengelola hasil-hasil daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah yang bersangkutan (Jaminta Sinaga, 2017).

Akuntansi sangat penting. Dalam hal ini, akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang membantu dalam penyelesaian tugas-tugas organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam organisasi sektor publik, peran akuntansi dalam mencapai tata kelola yang baik sangat penting dalam mendukung akuntabilitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas serta membangun visi strategis. Saat ini, akuntansi bukan hanya alat untuk mencatat peristiwa ekonomi, tetapi juga tujuan dari setiap proses. Dalam setiap entitas ekonomi, akuntansi sektor publik dan swasta berkontribusi pada pemrosesan sumber daya dalam organisasi tersebut. Kontribusinya terhadap akuntansi perusahaan meliputi penetapan pengendalian internal, verifikasi akuntabilitas, dan penyediaan informasi yang andal dan transparan. Bisnis apa pun yang memerlukan proses akuntansi dapat menghitung dan mencapai tujuan bisnis secara akurat.

Istilah "tata kelola pemerintahan yang baik" muncul di Indonesia pada tahun 1990-an dan semakin populer. Tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting dan strategis dalam menjalankan pemerintahan kita. Dalam pengertian itu, pemerintahan yang baik tidak ada, mengingat ia muncul pada saat pemerintahan Indonesia mengalami distorsi dalam efektivitas pelayanan kepada warganya. Ini adalah rahasia umum ketika berhadapan dengan birokrasi pemerintah yang pada dasarnya rumit, sangat lambat, memiliki biaya ilegal, dan memberikan layanan yang buruk. Hal ini karena beberapa pola lama dalam administrasi pemerintahan tidak lagi selaras dengan perubahan tatanan sosial. Artinya, meskipun ada perbaikan dalam demokrasi, hak asasi manusia, dan kualitas partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, pemerintahan menjadi semakin tidak efektif (Adolph, 2016).

## METODE

Dalam penulisan artikel ini, metode kualitatif digunakan dalam pendekatan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh gagasan ganda atas perannya dalam variabel yang diteliti. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi atau teori yang dikumpulkan dari literatur dalam artikel jurnal online Google Scholar yang terkait dengan artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Good Governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yang terkait. Penerapan konsep ini dimaksudkan agar terciptanya pengelolaan dan pengendalian yang baik dari suatu organisasi publik menyangkut pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama, yaitu untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pengelolaan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif.

Hasil pengamatan (observasi peneliti) yang berpedoman pada beberapa aspek yang menjadi acuan dalam pengamatan pada indikator penerapan *good governance*, diketahui bahwa aspek transparansi memperoleh total nilai pengamatan yaitu 9 dengan presentase 25%, kemudian pada aspek partisipasi dan akuntabilitas masing-masing memiliki total nilai 8 dengan presentase 22.22%. sehingga apabila dikalkulasikan dari presentase per-aspek tersebut, diperoleh presentase sebesar 69.44%. hasil pengamatan dari indikator penerapan *Good Governance* mengandung arti bahwa dibutuhkan pembenahan dan peningkatan di aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas meskipun hasil pengamatan terbilang cukup baik apabila ditinjau dari presentase total secara keseluruhan. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui pada aspek partisipasi salah satu yang masih menjadi hal yang wajib dibenahi adalah belum tersediannya sarana atau fasilitas jelas bagi masyarakat untuk dapat memberikan aspirasi, saran hingga kritik.

Dinas Sosial Sumut merupakan salah satu dari instansi pemerintah negara bagian. Dalam hal ini dinas sosial menjadi wadah bagi relawan sosial dan pekerja sosial, serta penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang sosial. Sebagai organisasi sektor publik, layanan sosial dapat menanggapi jenis kebutuhan dan hak publik. Tujuan organisasi sektor publik adalah nirlaba, artinya pelayanan kepada masyarakat merupakan hal terpenting yang harus diutamakan dan dilakukan. Organisasi ini bertanggung jawab kepada masyarakat dan dewan, dan anggarannya bersifat publik karena pendanaannya berasal dari dan kembali ke masyarakat. Tata kelola yang baik berperan penting dalam meningkatkan kinerja masyarakat Dinas Kesejahteraan Sosial Sumut juga harus menyediakan Laporan Keuangan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan tersebut harus akuntabel, terpercaya, dan transparan sehingga rumusan kebijakan dan keputusan Dinas Sosial Sumut dapat menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam menyampaikan keinginannya. Peran akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk mendukung penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Hal ini mempertimbangkan informasi Laporan Keuangan Dinas Sosial Sumut dan menjamin transparansi bagi perusahaan dengan manajemen perusahaan yang sehat. Tata kelola adalah mungkin. Akuntansi juga berperan dalam melaksanakan aktivitas terprogram, menyelesaikan aktivitas yang direncanakan, dan menyediakan perhitungan agar berfungsi dengan baik (Yafizham & Daulay, 2023).

Selanjutnya berdasarkan dengan beberapa teori dan hasil kajian empirik (penelitian yang relevan), dapat ditarik kesimpulan dan dipahami bersama bahwa penerapan *good governance* akan sangat membawa dampak positif yang optimal ketika para pelaku kebijakan memiliki komitmen dan kesadaran didalam menjalankan kewajiban sebagai pelayan publik dengan mengedepankan profesionalitas dan integritasnya.

## KESIMPULAN

Pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat strategis dalam mendukung *good governance* dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan komitmen dari semua pihak terkait untuk mengatasi tantangan yang ada dalam implementasinya.

## SARAN

Berikut adalah beberapa saran berdasarkan jurnal mengenai peranan pengukuran kinerja dalam mewujudkan *good governance*:

1. Pengembangan Indikator Kinerja: sangat penting dalam mengembangkan indikator kinerja yang jelas dan terukur yang dapat mencerminkan tujuan dan kebijakan public serta sistem pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan *good governance* dengan konteks lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat.

2. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengukuran kinerja harus dilakukan secara transparan, dengan hasil yang dapat diakses oleh publik. Ini membantu meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
3. Pelatihan dan Kapasitas SDM: Investasi dalam pelatihan pegawai negeri sipil agar mereka memahami pentingnya pengukuran kinerja dan cara mengimplementasikannya. Kapasitas sumber daya manusia sangat penting untuk keberhasilan sistem pengukuran kinerja.
4. Partisipasi Publik: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengukuran kinerja, seperti melalui survei atau forum diskusi, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan meningkatkan legitimasi proses.
5. Teknologi dan Inovasi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan pengumpulan data, analisis, dan penyebaran informasi mengenai kinerja lembaga pemerintah.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pengukuran kinerja dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan *good governance* di pemerintahan provinsi Sumatera utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). Peranan Camat dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang.(2), 1–23.
- Jaminta Sinaga. (2017). Peranan Akuntansi Manajemen Sektor Publik Menuju Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 3(2), 164–178.
- Nainggolan, A. (2016). Penganggaran Berbasis Kinerja untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 2(1), 73–79.
- Octaviana, D. E., Idris, A. Z., Dharma, F., & Azhar, R. (2024). *Economics and Digital Business Review* Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Terhadap Kinerja Pegawai Di Polda Lampung. 5(2).
- Ridwan, M., & Sandi, H. E. (2019). Pengaruh Interaksi Antara Total Quality Management Dengan Sistem Penghargaan, Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponen Di Kota Jambi). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 8(1), 13–28. <https://doi.org/10.22437/jmk.v8i1.6931>
- Ulum, A. S. (2011). Peran Pengukuran Kinerja dalam Mendukung Good Governance dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1), 60–66.
- Yafizham, M., & Daulay, A. N. (2023). Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara). *Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 1–15. Retrieved from <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i1.986>
- Jaminta Sinaga. (2017). Peranan Akuntansi Manajemen Sektor Publik Menuju Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 3(2), 164–178.
- Nainggolan, A. (2016). Penganggaran Berbasis Kinerja untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 2(1), 73–79.
- Octaviana, D. E., Idris, A. Z., Dharma, F., & Azhar, R. (2024). *Economics and Digital Business Review* Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Terhadap Kinerja Pegawai Di Polda Lampung. 5(2).
- Ridwan, M., & Sandi, H. E. (2019). Pengaruh Interaksi Antara Total Quality Management Dengan Sistem Penghargaan, Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponen Di Kota Jambi). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 8(1), 13–28. <https://doi.org/10.22437/jmk.v8i1.6931>
- Ulum, A. S. (2011). Peran Pengukuran Kinerja dalam Mendukung Good Governance dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1), 60–66.

Yafizham, M., & Daulay, A. N. (2023). Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara). *Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 1-15. Retrieved from <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i1.986>